

EFISIENSI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH DI PROPINSI JAWA TENGAH

Lela Dina Pertiwi

Alumnus Prodi Ilmu Ekonomi FE UII Yogyakarta

Abstract

Through the fiscal decentralization underlied the law No 22 in 1999, the local government now is more responsibility to develop its local economy. The goal of the fiscal decentralization is in order to increase efficiency of the local government in spending its budget. Under assumption that local government is much better know its own need than the central government, every spending will achieve a target according to society goals.

This study is to measure the level of efficiency of local government spending in the case of education and health sector in all regency of the central Java province during 1999 and 2002 period by using the Data Envelopment Analysis. In 1999, the results show that the most efficiency on the education spending is Salatiga and it is Boyolali in 2002. Meanwhile, the most efficiency on the health spending is Salatiga and Surakarta achieves the highest efficiency on it in 2002 .

Keywords: *Efficiency, local government spending, DEA, education and health.*

PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya Otonomi daerah berdasar Undang-Undang No. 22 tahun 1999, maka tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah akan semakin banyak. Dalam hal pembangunan perekonomian daerah, peranan pemerintah dapat dikaji dari sisi anggarannya (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan. Instrumen ini diharapkan berfungsi sebagai salah satu komponen pemicu tumbuhnya perekonomian daerah.

Desentralisasi pada dasarnya adalah penataan mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan efisien (Kartasasmita, 1996: 342). Pemerintah daerah

dianggap lebih mengetahui kebutuhan dan kondisi daerahnya, keinginan masyarakat di daerah masing-masing dibandingkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat merealisasikan pendapatan yang mereka punya dengan membelanjakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.

Desentralisasi fiskal ini didesain dengan asumsi bahwa pemerintah daerah lebih tahu akan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Dengan demikian diharapkan desentralisasi fiskal mampu meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah. Tingginya efisiensi pengeluaran pemerintah daerah maka pembangunan ekonomi di daerah bisa lebih terakselerasi.

Namun, otonomi daerah yang telah berjalan sejak januari 2001, dimaknai dengan berlomba-lombanya semua daerah untuk menggenjot sumber penerimaan tanpa memperhitungkan berbagai kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkannya seperti

ekonomi biaya tinggi sehingga menurunnya minat investor untuk melakukan investasi, degradasi kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya justru kontraproduktif dari tujuan awal desentralisasi. (Tarigan, 2005: 46).

PP No. 105 tahun 2000 dan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 yang mengatur anggaran berbasis kinerja menjadi momentum penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi daerah. Sementara itu disahkannya UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara semakin mendukung bagi anggaran pemerintah daerah yang berbasis kinerja ini. Implikasi penting dari anggaran berbasis kinerja ini adalah prestasi setiap daerah dalam pengelolaan keuangannya diukur dari seberapa cepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan bukan pada kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

Dalam konteks anggaran berbasis kinerja ini maka pengukuran efisiensi pengeluaran pemerintah daerah sesuatu yang urgen untuk melihat kinerja pemerintah daerah di dalam melakukan pelayanan publik. Studi ini ingin menganalisis tentang tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah daerah di kabupaten/kota di Propinsi di Jawa Tengah di sektor pendidikan dan kesehatan pada tahun 1999 dan 2002.

REVIEW PENELITIAN SEBELUMNYA

Beberapa penelitian mengenai efisiensi pengeluaran pemerintah telah dikaji dalam kasus di Indonesia. Asnita mencoba menganalisis kinerja kebijakan fiskal pemerintah daerah di 26 propinsi di Indonesia dengan menggunakan program *Data Envelopment Analysis* (DEA) tahun 1999-2002.

Ada beberapa temuan penting dari hasil studinya. Pertama, kapasitas Fiskal daerah di Indonesia sangat bervariasi bahkan

cenderung menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas fiskal antar daerah. Pada periode 1999-2002, wilayah yang mampu membiayai belanja rutin bersumber dari PAD hanya Jawa Timur dan Bali. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan sehingga diperlukan upaya lebih lanjut agar daerah mampu “membiayai” pengeluarannya. Kedua, dari perhitungan kinerja kebijakan fiskal menunjukkan adanya variasi bobot kinerja yang tinggi. Terdapat dua wilayah yang konsisten mencapai efisiensi tertinggi pada pungutan yakni DKI Jakarta dan Jawa Timur. Kedua daerah ini kemudian bisa menjadi referensi bagi daerah lain untuk peningkatan kinerja kebijakan fiskalnya. Kedua wilayah ini mampu mencapai efisiensi 100 persen selama empat periode. Ketiga, pada wilayah yang belum efisien memiliki sumber inefisiensi yang relatif beragam. Konsekuensinya, kebijakan untuk masing-masing daerah harus spesifik dengan tetap membandingkan terhadap perkembangan wilayah lain. Keempat, dengan mengaitkan kapasitas fiskal dan kinerja kebijakan terdapat kategori daerah. *Pertama*, memiliki kapasitas fiskal dan kinerja kebijakan yang tinggi. *Kedua*, kinerja yang baik namun kapasitas fiskal rendah. *Ketiga*, kinerja dan kapasitas fiskal sedang. *Keempat*, kinerja dan kapasitas fiskal sama-sama rendah.

Selanjutnya Akhmad Syakir Kurnia mengadakan penelitian mengenai “Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik, *Metode Free Disposable Hull (FDH)* Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2001-2002”. Berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja pemerintah untuk Kabupaten/Kota di Jawa tengah, *PSP Indicators*, terlihat bahwa ternyata Kabupaten/Kota yang proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB nya tinggi tidak serta merta memiliki angka indikator yang tinggi. Demikian pula dalam perhitungan efisiensi dengan *Pubic Sector Efficiency*

maupun *Free Disposable Hull*, kabupaten/kota yang proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB tidak selalu relatif efisien dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya alokasi pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah tidak berkorelasi dengan efisiensi dalam penggunaannya.

LANDASAN TEORI

Efisiensi adalah perbandingan output terhadap input, atau jumlah output per unit input (jumlah output/unit input). Dalam banyak pusat pertanggungjawaban, efisiensi diukur dengan cara membandingkan biaya-biaya aktual dengan standar dimana biaya-biaya tersebut harus diukur dengan output yang terukur. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Suatu aktivitas dapat dikatakan efisien apabila dapat memperoleh hasil yang sama dengan aktivitas lain tetapi sumber daya yang digunakan lebih sedikit.

Tingkat efisiensi diukur dengan indikator yang dihitung dari rasio antara nilai tambah (*value added*) dengan nilai output. Ini berarti semakin tinggi nilai rasio tersebut semakin tinggi tingkat efisiensinya, karena semakin rendah biaya input yang diperlukan untuk menghasilkan suatu unit output. Dalam istilah umum, efisiensi sering diartikan sebagai “dengan biaya sekecil-kecilnya diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang sebesar-besarnya”.

Menurut Pareto dan Koopmans (1950) sebuah organisasi atau perusahaan dikatakan efisien bila dapat hasilkan lebih banyak output dengan sejumlah input yang sama atau dengan menurunkan penggunaan input dapat dihasilkan output yang sama. Konsep dan pengertian efisiensi diatas kemudian diperluas oleh Farel (1957), Kopp(1981), Koop&Diewart (1982) yang mencoba menganalisis bagaimana respon antara perencanaan produksi dengan nilai

input serta nilai output itu sendiri dipasar. Bisa jadi kita dapat hasilkan output yang sama dengan menggunakan input yang sedikit, akan tetapi output yang kita hasilkan ternyata lebih mahal harganya dipasar dibanding output yang sama dihasilkan pesaing. Permasalahan mahalnya harga jual produk padahal dengan komposisi input yang semakin berkurang dapat disebabkan diantaranya; penurunan penggunaan input karena keterpaksaan, disebabkan harga input yang semakin mahal (Rustam, 2005: 175).

Secara umum ada dua komponen pengukuran efisiensi. Pertama, *Technical Efficiency* atau efisiensi teknis. Efisiensi ini mencoba mengukur tingkat penggunaan dari sarana Ekonomi/sejumlah input untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Kedua, *Allocative Efficiency* atau efisiensi alokatif. Mengukur sampai sejauh mana kombinasi optimal dari ragam input yang digunakan dalam proses produksi pada tingkat harga relatif.

Efisiensi dalam pengeluaran belanja pemerintah daerah didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika tidak mungkin lagi realokasi sumber daya yang dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, efisiensi pengeluaran belanja pemerintah daerah diartikan ketika setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang paling optimal. Ketika kondisi tersebut terpenuhi, maka dikatakan pengeluaran pemerintah telah mencapai tingkat yang efisien (Kurnia, 2005).

METODOLOGI PENELITIAN

Data Envelopment Analysis (DEA)

Metode analisis yang digunakan adalah metode non parametrik dengan metode *Data Envelopment Analysis*. DEA merupakan prosedur yang didesain secara khusus untuk mengukur efisiensi relatif suatu unit kegiatan ekonomi (UKE) yang

menggunakan banyak input dan banyak output (*multi-input multi-output*) dimana penggabungan input dan output tersebut tidak mungkin dilakukan. Efisiensi relatif suatu UKE adalah efisiensi suatu UKE dibanding dengan UKE lain dalam sampel (sekelompok UKE yang saling diperbandingkan) yang menggunakan jenis input dan output yang sama.

Dalam DEA, efisiensi relatif UKE didefinisikan sebagai rasio dari total output tertimbang dibagi total input tertimbangnya (*total weighted output/ total weighted input*). Inti dari DEA adalah menentukan bobot (*weights*) atau timbangan untuk setiap input dan output UKE. Bobot tersebut memiliki sifat; (1) tidak bernilai negatif, dan (2) bersifat universal, artinya setiap UKE dalam sampel harus dapat menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi rasionya (*total weighted output/total weighted input*) dan rasio tersebut tidak boleh lebih dari 1 (*total weighted output/total weighted input* ≤ 1).

DEA berasumsi bahwa setiap UKE akan memilih bobot yang memaksimalkan rasio efisiensinya (*maximize total weighted output/total weighted input*). Karena setiap UKE menggunakan kombinasi input yang berbeda untuk menghasilkan kombinasi output yang berbeda pula, maka setiap UKE akan memilih seperangkat bobot yang mencerminkan keragaman tersebut. Secara umum UKE akan menetapkan bobot yang tinggi untuk input yang penggunaannya sedikit dan untuk output yang diproduksi dengan banyak. Bobot-bobot tersebut bukan merupakan nilai ekonomis dari input dan outputnya, melainkan sebagai penentu untuk memaksimalkan efisiensi dari suatu UKE.

Dalam analisis DEA perlu menggunakan teknik linear programming. Misal kita akan membandingkan efisiensi dari sejumlah UKE, misalkan n . Setiap UKE menggunakan m jenis input untuk menghasilkan s jenis output. Misal, $X_{ij} > 0$

merupakan jumlah input i yang digunakan oleh UKE j ; dan $Y_{rj} > 0$ merupakan jumlah output r yang dihasilkan oleh UKE j . Variabel keputusan dari kasus tersebut adalah bobot yang harus diberikan pada setiap input dan output oleh UKE k .

Misal v_{ik} adalah bobot yang diberikan pada input i oleh UKE k , dan u_{rk} adalah bobot yang diberikan pada output r oleh UKE k . Sehingga v_{ik} dan u_{rk} merupakan variabel keputusan, yaitu variabel yang nilainya akan ditentukan melalui iterasi program linear. Diformulasikan sejumlah n program linear fraksional, satu formulasi program linear untuk setiap UKE di dalam sampel. Fungsi tujuan dari setiap program linear fraksional tersebut adalah rasio dari output tertimbang total dari UKE k dibagi dengan input tertimbang totalnya.

Formulasi fungsi tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Maksimumkan } Z_k = \frac{\sum_{r=1}^s u_{rk} \cdot Y_{rk}}{\sum_{i=1}^m v_{ik} \cdot X_{ik}}$$

Kriteria universalitas mensyaratkan DMU k untuk memilih bobot dengan batasan/kendala bahwa tidak ada UKE lain yang akan memiliki efisiensi lebih besar dari 1 atau 100% jika UKE lain tersebut menggunakan bobot yang dipilih oleh UKE k .

Sehingga formulasi selanjutnya adalah:

$$\frac{\sum_{r=1}^s u_{rk} \cdot Y_{rj}}{\sum_{i=1}^m v_{ik} \cdot X_{ij}} \leq 1; j = 1, \dots, n$$

Bobot yang dipilih tidak boleh bernilai negatif:

$$u_{rk} \geq 0; r = 1, \dots, s$$

$$v_{ik} \geq 0; i = 1, \dots, m$$

Transformasi program linear, yang kita sebut dengan DEA (*Data Envelopment Analysis*), sebagai berikut :

$$(DEA) \text{ Maksimumkan } Z_k = \sum_{r=1}^s u_{rk} \cdot Y_{rk}$$

Dengan batasan/kendala:

$$[p_{kj}] \sum_{r=1}^s u_{rk} Y_{rj} - \sum_{i=1}^m v_{ik} X_{ij} \leq 0; j = 1, \dots, n$$

$$[q_k] \sum_{i=1}^m v_{ik} X_{ik} = 1$$

$$u_{rk} \geq 0; r=1, \dots, s$$

$$v_{rk} \geq 0; i=1, \dots, m$$

Data

Penelitian ini menggunakan data 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 1999 dan 2002. Data tersebut berupa laporan pengeluaran pembangunan daerah dalam APBD kabupaten/kota di Jawa Tengah, data dan Informasi kemiskinan menurut kabupaten/kota. Data input berupa pengeluaran pembangunan di sektor pendidikan dan pengeluaran di sektor kesehatan. Pengeluaran pembangunan sektor pendidikan adalah pengeluaran/belanja pembangunan pemerintah pada sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam realisasi APBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 1999/2000 dan 2002. Pengeluaran/belanja pembangunan sektor kesehatan adalah besarnya pengeluaran pembangunan pemerintah daerah pada sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja yang tercermin dalam realisasi APBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 1999/2000 dan 2002.

Data Output yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor pendidikan adalah

angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas. Sedangkan angka harapan hidup merupakan ukuran kinerja di sektor pendidikan.

PEMBAHASAN HASIL

Tingkat Efisiensi Pengeluaran Pendidikan

Hasil empiris pengukuran tingkat efisiensi pengeluaran pendidikan di kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 1999 dan 2002 menggunakan metode DEA dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 menunjukkan kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mencapai efisiensi sempurna (100%) pada tahun 1999 adalah Kota Salatiga. Sedangkan pada tahun 2002, Kabupaten Boyolali telah mencapai efisiensi sempurna (100%). Ini berarti bahwa Kota Salatiga dan Kabupaten Boyolali mampu memanfaatkan pengeluaran pendidikannya dengan optimal.

Perubahan yang sangat drastis pada Kabupaten Boyolali di tahun 2002, dimana pada tahun 1999 tingkat efisiensinya hanya sebesar 7,71% (tidak efisien). Perubahan ini dikarenakan terjadinya penurunan pada tingkat output yaitu rata-rata lama sekolah (6,2 tahun) dan angka melek huruf (81,4%). Penurunan tingkat output dikarenakan masih banyaknya anak putus sekolah. Banyak orangtua yang memandang pendidikan tidak penting, disamping itu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang amat memprihatinkan turut mendorong anak-anak putus sekolah. Sedangkan pada tahun 2002 Kota Salatiga mengalami sedikit penurunan menjadi 99,93%. Kabupaten/kota lainnya tingkat efisiensinya cenderung belum efisien. Ini berarti pemerintah daerah di masing-masing kabupaten/kota belum dapat mengoptimalkan pengeluaran pemerintah khususnya di sektor pendidikan dengan baik.

Tabel 1: Tingkat Efisiensi Pengeluaran Pendidikan Tahun 1999 dan 2002

Kabupaten/Kota	Efisiensi (%)		Kabupaten/Kota	Efisiensi (%)	
	1999	2002		1999	2002
Kab. Cilacap	3,04	28,36	Kab. Kudus	7,17	27,96
Kab. Banyumas	4,56	21,86	Kab. Jepara	6,06	4,41
Kab. Purbalingga	4,16	20,23	Kab. Demak	7,77	-
Kab. Banjarnegara	3,93	24,16	Kab. Semarang	7,48	25,92
Kab. Kebumen	3,75	25,05	Kab. Temanggung	13,45	28,80
Kab. Purworejo	6,41	46,13	Kab. Kendal	7,94	2,87
Kab. Wonosobo	8,26	33,28	Kab. Batang	6,65	18,61
Kab. Magelang	6,34	44,41	Kab. Pekalongan	8,04	14,72
Kab. Boyolali	7,71	100	Kab. Pemalang	4,39	17,04
Kab. Klaten	5,23	33,50	Kab. Tegal	2,37	12,99
Kab. Sukoharjo	9,04	38,51	Kab. Brebes	6,33	7,30
Kab. Wonogiri	3,58	28,53	Kota Magelang	13,35	88,82
Kab. Karanganyar	6,19	49,34	Kota Surakarta	8,96	54,33
Kab. Sragen	7,36	53,84	Kota Salatiga	100	99,93
Kab. Grobogan	4,90	11,93	Kota Semarang	4,94	38,06
Kab. Blora	4,78	7,43	Kota Pekalongan	19,65	22,18
Kab. Rembang	9,40	22,96	Kota Tegal	9,29	20,40
Kab. Pati	6,25	14,84			

Sumber: BPS, diolah

Tingkat Efisiensi Pengeluaran Kesehatan

Hasil empiris pengukuran tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah daerah di sektor kesehatan di kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 1999 dan 2002 dengan menggunakan metode DEA dapat dilihat pada Tabel 2. Kabupaten/kota yang mampu mencapai efisiensi terbaik di sektor kesehatan pada tahun 1999 adalah Kota Salatiga. Sedangkan pada tahun 2002 kabupaten/kota yang telah mencapai efisiensi terbaik adalah Kota Surakarta.

Besarnya efisiensi pada dua tahun ini (1999 dan 2002) berfluktuasi, hal ini terlihat di tahun 2002 Kota Salatiga tingkat efisiensinya hanya sebesar 7,22% (belum

efisien), padahal pada tahun 1999 tingkat efisiensinya telah sempurna (100%). Hal yang sama juga dialami Kota Surakarta namun kota ini mengalami peningkatan efisiensi. Pada tahun 1999 tingkat efisiensi Kota Surakarta hanya sebesar 12,24% (belum efisien) dan pada tahun 2002 meningkat drastis hingga 100 % (efisien).

Tingkat efisiensi kabupaten/kota lainnya masih cenderung belum efisien. Bahkan di Tahun 1999, Kabupaten Tegal tingkat efisiensinya hanya sebesar 1,23% (efisiensi terendah) walaupun pada tahun 2002 terjadi peningkatan sebesar 5,41%. Hal yang sama juga terjadi pada kabupaten/kota lainnya.

Tabel 2: Tingkat Efisiensi Pengeluaran Kesehatan Tahun 1999 dan 2002

Kabupaten/Kota	Efisiensi (%)		Kabupaten/Kota	Efisiensi (%)	
	1999	2002		1999	2002
Kab. Cilacap	1,60	10,22	Kab. Kudus	11,82	20,22
Kab. Banyumas	4,39	42,03	Kab. Jepara	5,61	3,07
Kab. Purbalingga	7,12	7,39	Kab. Demak	6,38	-
Kab. Banjarnegara	13,04	21,12	Kab. Semarang	6,07	8,16
Kab. Kebumen	12,62	23,47	Kab. Temanggung	23,87	10,56
Kab. Purworejo	10,23	40,82	Kab. Kendal	5,47	18,68
Kab. Wonosobo	17,41	7,45	Kab. Batang	12,48	19,51
Kab. Magelang	9,27	36,67	Kab. Pekalongan	14,74	46,57
Kab. Boyolali	11,25	28,82	Kab. Pemalang	3,17	24,60
Kab. Klaten	10,07	24,12	Kab. Tegal	1,23	5,41
Kab. Sukoharjo	25,89	20,24	Kab. Brebes	4,16	16,54
Kab. Wonogiri	4,70	28,88	Kota Magelang	32,81	24,83
Kab. Karanganyar	9,61	68,84	Kota Surakarta	12,24	100
Kab. Sragen	31,92	35,97	Kota Salatiga	100	7,22
Kab. Grobogan	5,66	8,95	Kota Semarang	2,98	9,69
Kab. Blora	4,82	11,60	Kota Pekalongan	34,18	33,20
Kab. Rembang	8,83	9,79	Kota Tegal	14,25	5,44
Kab. Pati	8,06				

Sumber : BPS, diolah

Meningkatkan Efisiensi Sektor Pendidikan dengan Meminimumkan Input

Efisiensi metode DEA adalah efisiensi relatif. Untuk meningkatkan tingkat efisiensi yang ditunjukkan dengan angka 100 %, maka dapat diketahui input mana saja yang belum efisien penggunaannya dan output mana saja yang harus ditingkatkan. Yang dimaksud dengan efisien adalah menghasilkan suatu nilai output yang maksimum dengan sejumlah input tertentu, atau dengan input minimum dapat menghasilkan output tertentu.

Agar tingkat efisiensi pada kabupaten/kota di Jawa tengah (kecuali Kab. Boyolali dan Kota Salatiga) meningkat maka penggunaan input pada kab/kota tersebut harus mengacu pada kab/kota lain yang telah efisien. Dari Tabel 1 menunjukkan bagaimana solusinya meningkatkan efisiensi pada kabupaten/kota yang belum efisien.

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat besarnya efisiensi pengeluaran pemerintah

di sektor pendidikan pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 1999 rata-rata belum efisien, dominan tingkat efisiensinya di bawah 10%. Pada Kabupaten Tegal, tingkat efisiensi pengeluaran pendidikannya sebesar 2,4%, artinya agar menjadi efisien maka pengeluaran pendidikannya harus dikurangi sebanyak 97,6%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah di Kabupaten Tegal melakukan pemborosan dalam mengalokasikan pengeluaran pendidikannya.

Pada tahun 2002, berdasarkan tabel 1 tingkat efisiensi pengeluaran pendidikan meningkat dari tahun sebelumnya. Kabupaten Kendal mencapai tingkat efisiensi pengeluaran pendidikan paling rendah sebesar 2,87%. Agar menjadi efisien (100%) maka harus mengurangi pengalokasian pengeluaran pendidikannya sebesar 97,1%. Sedangkan Kota Salatiga yang sebelumnya paling efisien telah terjadi pemborosan pengeluaran di bidang pendidikan sebesar 0,1%.

Meningkatkan Efisiensi Sektor Kesehatan dengan Meminimumkan Input

Sebagaimana efisiensi di sektor Pendidikan, Kabupaten Tegal tingkat efisiensi pengeluarannya paling rendah hanya mencapai 1,2% pada tahun 1999. Agar menjadi efisien harus pengurangi pengalokasian pengeluaran kesehatan sebesar 98,8%, lihat Tabel 2.

Tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah daerah di sektor kesehatan pada tahun

2002 meningkat dari tahun sebelumnya seperti di sektor pendidikan. Kota Surakarta merupakan daerah yang mampu mengalokasikan pengeluarannya secara baik, ini terlihat dari efisiensi yang dicapai yaitu sebesar 100%. Sedangkan kabupaten Jepara adalah Kabupaten yang tingkat efisiensinya di sektor kesehatan paling rendah hanya sebesar 3,1 %. Agar menjadi efisien maka pengeluaran kesehatan harus dikurangi sebesar 96,9%.

Tabel 6: Aktual, Target Dan Efisiensi Yang Dicapai Dengan Meminimumkan Input di Kab/Kota Jateng Tahun 2002

Kab/Kota	Input	Aktual	Target	To Gain	Achieved
Kab. Jepara	Pengeluaran Kesehatan	18445,9	566,6	96,9%	3,1%
Kab. Pati	Pengeluaran Kesehatan	11354,4	586,8	94,8%	5,2%
Kab. Tegal	Pengeluaran Kesehatan	9913,5	535,8	94,6%	5,4%
Kota Tegal	Pengeluaran Kesehatan	9955,1	541,5	94,6%	5,4%
Kota Salatiga	Pengeluaran Kesehatan	7871,9	568,2	92,8%	7,2%
Kab. Purbalingga	Pengeluaran Kesehatan	7399,3	547,2	92,6%	7,4%
Kab. Wonosobo	Pengeluaran Kesehatan	7445,0	554,5	92,6%	7,4%
Kab. Semarang	Pengeluaran Kesehatan	7075,0	577,1	91,8%	8,2%
Kab. Grobogan	Pengeluaran Kesehatan	6157,5	551,2	91,0%	9,0%
Kota Semarang	Pengeluaran Kesehatan	5879,0	569,8	90,3%	9,7%
Kab. Rembang	Pengeluaran Kesehatan	5669,0	555,3	90,2%	9,8%
Kab. Cilacap	Pengeluaran Kesehatan	5369,6	548,8	89,8%	10,2%
Kab. Temanggung	Pengeluaran Kesehatan	5470,6	577,9	89,4%	10,6%
Kab. Blora	Pengeluaran Kesehatan	4905,5	569,0	88,4%	11,6%
Kab. Brebes	Pengeluaran Kesehatan	3146,5	520,5	83,5%	16,5%
Kab. Kendal	Pengeluaran Kesehatan	2816,3	526,1	81,3%	18,7%
Kab. Batang	Pengeluaran Kesehatan	2850,5	556,1	80,5%	19,5%
Kab. Kudus	Pengeluaran Kesehatan	2730,3	552,0	79,8%	20,2%
Kab. Sukoharjo	Pengeluaran Kesehatan	2771,3	560,9	79,8%	20,2%
Kab. Banjarnegara	Pengeluaran Kesehatan	2595,0	548,0	78,9%	21,1%
Kab. Kebumen	Pengeluaran Kesehatan	2331,1	547,2	76,5%	23,5%
Kab. Klaten	Pengeluaran Kesehatan	2342,7	565,0	75,9%	24,1%
Kab. Pemasang	Pengeluaran Kesehatan	2145,0	527,7	75,4%	24,6%
Kota Magelang	Pengeluaran Kesehatan	2258,6	560,9	75,2%	24,8%
Kab. Boyolali	Pengeluaran Kesehatan	1954,8	563,4	71,2%	28,8%
Kab. Wonogiri	Pengeluaran Kesehatan	2006,6	579,5	71,1%	28,9%
Kota Pekalongan	Pengeluaran Kesehatan	1672,5	555,3	66,8%	33,2%
Kab. Sragen	Pengeluaran Kesehatan	1609,0	578,7	64,0%	36,0%
Kab. Magelang	Pengeluaran Kesehatan	1518,8	556,9	63,3%	36,7%
Kab. Purworejo	Pengeluaran Kesehatan	1348,3	550,4	59,2%	40,8%
Kab. Banyumas	Pengeluaran Kesehatan	1321,2	555,3	58,0%	42,0%
Kab. Pekalongan	Pengeluaran Kesehatan	1157,5	539,1	53,4%	46,6%
Kab. Karanganyar	Pengeluaran Kesehatan	844,3	581,2	31,2%	68,8%
Kota Surakarta	Pengeluaran Kesehatan	575,5	575,5	0,0%	100,0%

Sumber : BPS, diolah

Meningkatkan Efisiensi Sektor Pendidikan dengan Memaksimumkan Output

Untuk mengatasi inefisiensi tidak hanya dapat dilakukan dengan meminimumkan input tetapi dapat juga dilakukan dengan memaksimumkan outputnya. Dalam pembahasan ini, agar suatu unit kegiatan ekonomi (UKE) menjadi efisien (100%) maka dapat diselesaikan dengan meningkatkan output dengan input tertentu.

Tingkat efisiensi dengan meminimumkan input dan memaksimumkan output mempunyai nilai efisiensi yang sama. Yang membedakan hanyalah pada perubahan yang harus dilakukan baik pada input ataupun pada output. Dalam pembahasan ini, untuk mencapai efisiensi yang sempurna (100%) maka output UKE yang belum efisien harus ditingkatkan.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, jumlah output yang harus dimaksimumkan pada tiap-tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah cenderung tinggi. Kabupaten/kota

yang efisiensi pengeluarannya sempurna pada tahun 1999 hanya pada Kota Salatiga. Ini berarti Kota Salatiga mampu mengalokasikan pengeluarannya dengan baik.

Di Kabupaten Tegal, efisiensi yang dicapai pada rata-rata lama sekolah sebesar 1,6% dan angka melek huruf sebesar 2,4% untuk meningkatkan efisiensi menjadi 100% maka harus meningkatkan outputnya yaitu pada rata-rata lama sekolah sebesar 342,7 % dan angka melek huruf sebesar 3526,4%. Sama halnya pada Kabupaten Cilacap, efisiensi yang dicapai pada rata-rata lama sekolah sebesar 2,0% dan angka melek huruf sebesar 3,0%, artinya agar efisiensi pengeluaran pendidikan meningkat maka harus meningkatkan rata-rata lama sekolah sebesar 269,1% dan angka melek huruf sebesar 2769,3%. Sedangkan kabupaten/kota lainnya bisa dilihat secara detil pada Tabel 3 untuk tahun 1999.

Tabel 3: Aktual, Target dan Efisiensi Yang Dicapai Dengan Memaksimumkan Output Pada Sektor Pendidikan Tahun 1999

Kab/Kota	Output	Aktual	Target	Achieved
Kab. Tegal	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,6	342,7	1,6%
	2.Angka Melek Huruf	83,5	3526,4	2,4%
Kab. Cilacap	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,4	269,1	2,0%
	2.Angka Melek Huruf	84,2	2769,3	3,0%
Kab. Wonogiri	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,6	207,1	2,6%
	2.Angka Melek Huruf	87,2	2131,5	3,8%
Kab. Kebumen	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,9	225,9	2,6%
	2.Angka Melek Huruf	87,2	2324,9	3,8%
Kab. Banjarnegara	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,6	212,2	2,6%
	2.Angka Melek Huruf	85,9	2183,3	3,9%
Kab. Purbalingga	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,3	201,4	2,6%
	2.Angka Melek Huruf	86,2	2072,0	4,2%
Kab. Pemalang	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,2	182,0	2,9%
	2.Angka Melek Huruf	82,3	1872,9	4,4%
Kab. Banyumas	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,4	194,4	3,3%
	2.Angka Melek Huruf	91,2	1999,9	4,6%
Kab. Blora	1.Rata-Rata Lama Sekolah	4,8	150,7	3,2%
	2.Angka Melek Huruf	74,1	1551,0	4,8%

Kab/Kota	Output	Aktual	Target	Achieved
Kab. Grobogan	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,6	169,7	3,3%
	2.Angka Melek Huruf	85,6	1746,8	4,9%
Kota Semarang	1.Rata-Rata Lama Sekolah	8,7	184,0	4,7%
	2.Angka Melek Huruf	93,6	1893,7	4,9%
Kab. Klaten	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,7	150,7	4,4%
	2.Angka Melek Huruf	81,1	1551,2	5,2%
Kab. Jepara	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,0	133,7	4,5%
	2.Angka Melek Huruf	83,1	1375,6	6,0%
Kab. Karanganyar	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,1	122,9	5,0%
	2.Angka Melek Huruf	78,3	1264,4	6,2%
Kab. Pati	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,6	124,4	4,5%
	2.Angka Melek Huruf	80,0	1280,2	6,2%
Kab. Brebes	1.Rata-Rata Lama Sekolah	4,8	127,3	3,8%
	2.Angka Melek Huruf	83,0	1310,4	6,3%
Kab. Magelang	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,3	132,1	4,8%
	2.Angka Melek Huruf	86,2	1359,3	6,3%
Kab. Purworejo	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,3	130,8	4,8%
	2.Angka Melek Huruf	86,3	1345,8	6,4%
Kab. Batang	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,1	125,3	4,1%
	2.Angka Melek Huruf	85,8	1289,6	6,7%
Kab. Kudus	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,9	120,3	5,7%
	2.Angka Melek Huruf	88,8	1238,1	7,2%
Kab. Sragen	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,3	94,6	5,6%
	2.Angka Melek Huruf	71,6	973,1	7,4%
Kab. Semarang	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,6	116,1	5,7%
	2.Angka Melek Huruf	89,4	1194,7	7,5%
Kab. Boyolali	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,2	102,5	6,0%
	2.Angka Melek Huruf	81,4	1055,2	7,7%
Kab. Demak	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,1	111,6	5,5%
	2.Angka Melek Huruf	89,2	1148,2	7,8%
Kab. Kendal	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,4	103,2	5,2%
	2.Angka Melek Huruf	84,3	1062,0	7,9%
Kab. Pekalongan	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,3	101,8	5,2%
	2.Angka Melek Huruf	84,2	1047,9	8,0%
Kab. Wonosobo	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,4	101,8	5,3%
	2.Angka Melek Huruf	86,5	1047,1	8,3%
Kota Surakarta	1.Rata-Rata Lama Sekolah	8,9	100,7	8,8%
	2.Angka Melek Huruf	92,9	1036,5	9,0%
Kab. Sukoharjo	1.Rata-Rata Lama Sekolah	7,4	90,3	8,2%
	2.Angka Melek Huruf	84,0	928,8	9,0%
Kota Tegal	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,6	90,5	7,3%
	2.Angka Melek Huruf	86,5	931,0	9,3%

Kab/Kota	Output	Aktual	Target	Achieved
Kab. Rembang	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,9	87,6	6,7%
	2.Angka Melek Huruf	84,8	901,9	9,4%
Kab. Temanggung	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,6	65,7	8,5%
	2.Angka Melek Huruf	91,0	676,3	13,5%
Kota Magelang	1.Rata-Rata Lama Sekolah	9,0	67,1	13,4%
	2.Angka Melek Huruf	93,4	690,4	13,5%
Kota Pekalongan	1.Rata-Rata Lama Sekolah	7,1	44,4	16,0%
	2.Angka Melek Huruf	89,8	457,1	19,6%
Kota Salatiga	1.Rata-Rata Lama Sekolah	9,3	9,3	100,0%
	2.Angka Melek Huruf	95,7	95,7	100,0%

Sumber : BPS, diolah

Pada tahun 2002 efisiensi pengeluaran pendidikannya sempurna hanya pada Kota Boyolali. Ini dapat dilihat besarnya angka nominal pada kolom aktual sama dengan kolom target. Tingkat efisiensi pengeluaran pendidikan pada tahun 2002 cenderung meningkat pada tahun 1999, ini berarti mulai pulihnya kebijakan-kebijakan pada setiap daerah di kabupaten/kota Jawa Tengah.

Kota Salatiga pada tahun 2002 ini mengalami penurunan efisiensi, ini dikarenakan terjadinya penurunan output. Tingkat efisiensi pada rata-rata lama sekolah

sebesar 99,9% dan angka melek huruf sebesar 79,1%. Agar efisiensi pengeluaran pendidikannya sempurna maka, Kota Salatiga harus meningkatkan outputnya yaitu rata-rata lama sekolah sebesar 9,5% dan angka melek huruf sebesar 118,0%. Sama halnya dengan Kota Magelang agar efisiensi pengeluaran pendidikannya menjadi 100% maka harus meningkatkan outputnya yaitu rata-rata lama sekolah sebesar 11,0% dan angka melek huruf sebesar 136,9%. Tabel 4. menyajikan secara detail bagaimana meningkatkan efisiensi dari sisi output untuk kabupaten/kota lainnya.

Tabel 4: Aktual, Target dan Efisiensi Yang Dicapai Dengan Memaksimumkan Output Pada Sektor Pendidikan Tahun 2002

Kab/Kota	Output	Aktual	Target	Achieved
Kab. Kendal	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,5	248,4	2,6%
	2.Angka Melek Huruf	88,6	3082,2	2,9%
Kab. Jepara	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,5	158,9	4,1%
	2.Angka Melek Huruf	87,0	1971,2	4,4%
Kab. Brebes	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,0	89,5	5,6%
	2.Angka Melek Huruf	81,1	1110,8	7,3%
Kab. Blora	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,7	87,4	6,5%
	2.Angka Melek Huruf	86,5	1084,5	7,4%
Kab. Grobogan	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,3	58,4	10,8%
	2.Angka Melek Huruf	86,5	725,1	11,9%
Kab. Tegal	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,6	51,4	10,9%
	2.Angka Melek Huruf	82,8	637,3	13,0%
Kab. Pekalongan	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,6	46,3	12,1%
	2.Angka Melek Huruf	84,6	574,8	14,7%

Kab/Kota	Output	Aktual	Target	Achieved
Kab. Pati	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,5	47,5	13,7%
	2.Angka Melek Huruf	87,4	589,1	14,8%
Kab. Pemalang	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,4	38,9	13,9%
	2.Angka Melek Huruf	82,2	482,3	17,0%
Kab. Batang	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,9	36,8	16,0%
	2.Angka Melek Huruf	84,9	456,2	18,6%
Kab. Purbalingga	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,6	35,4	15,8%
	2.Angka Melek Huruf	88,8	438,9	20,2%
Kota Tegal	1.Rata-Rata Lama Sekolah	7,6	37,3	20,4%
	2.Angka Melek Huruf	91,0	462,3	19,7%
Kab. Banyumas	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,3	33,0	19,1%
	2.Angka Melek Huruf	89,6	409,9	21,9%
Kota Pekalongan	1.Rata-Rata Lama Sekolah	7,8	35,2	22,2%
	2.Angka Melek Huruf	91,6	436,4	21,0%
Kab. Rembang	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,8	30,1	19,3%
	2.Angka Melek Huruf	85,7	373,3	24,2%
Kab. Banjarnegara	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,3	27,4	19,3%
	2.Angka Melek Huruf	82,3	340,6	24,2%
Kab. Kebumen	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,2	27,5	22,5%
	2.Angka Melek Huruf	85,6	341,7	25,1%
Kab. Semarang	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,8	27,5	24,7%
	2.Angka Melek Huruf	88,5	341,5	25,9%
Kab. Kudus	1.Rata-Rata Lama Sekolah	7,1	25,6	27,8%
	2.Angka Melek Huruf	88,7	317,3	28,0%
Kab. Cilacap	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,1	24,7	24,7%
	2.Angka Melek Huruf	87,0	306,8	28,4%
Kab. Wonogiri	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,9	21,9	27,0%
	2.Angka Melek Huruf	77,4	271,3	28,5%
Kab. Temanggung	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,3	25,6	24,6%
	2.Angka Melek Huruf	91,6	318,0	28,8%
Kab. Wonosobo	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,6	20,6	27,2%
	2.Angka Melek Huruf	85,1	255,7	33,3%
Kab. Klaten	1.Rata-Rata Lama Sekolah	7,3	21,8	33,5%
	2.Angka Melek Huruf	82,8	270,4	30,6%
Kota Semarang	1.Rata-Rata Lama Sekolah	10,0	26,3	38,1%
	2.Angka Melek Huruf	95,5	326,0	29,3%
Kab. Sukoharjo	1.Rata-Rata Lama Sekolah	7,9	20,5	38,5%
	2.Angka Melek Huruf	82,2	254,6	32,3%
Kab. Magelang	1.Rata-Rata Lama Sekolah	7,0	16,1	43,3%
	2.Angka Melek Huruf	89,0	200,4	44,4%
Kab. Purworejo	1.Rata-Rata Lama Sekolah	7,1	15,5	45,9%
	2.Angka Melek Huruf	88,5	191,8	46,1%

Kab/Kota	Output	Aktual	Target	Achieved
Kab. Karanganyar	1.Rata-Rata Lama Sekolah	7,0	14,2	49,3%
	2.Angka Melek Huruf	78,9	176,0	44,8%
Kab. Sragen	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,0	11,3	53,2%
	2.Angka Melek Huruf	75,3	139,9	53,8%
Kota Surakarta	1.Rata-Rata Lama Sekolah	9,8	18,0	54,3%
	2.Angka Melek Huruf	94,6	223,8	42,3%
Kota Magelang	1.Rata-Rata Lama Sekolah	9,8	11,0	88,8%
	2.Angka Melek Huruf	95,6	136,9	69,8%
Kota Salatiga	1.Rata-Rata Lama Sekolah	9,5	9,5	99,9%
	2.Angka Melek Huruf	93,3	118,0	79,1%
Kota Boyolali	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,6	6,6	100,0%
	2.Angka Melek Huruf	81,9	81,9	100,0%

Sumber : BPS, diolah

Meningkatkan Efisiensi Sektor Kesehatan dengan Memaksimalkan Output

Tabel 5: Aktual, Target dan Efisiensi Yang Dicapai Dengan Memaksimalkan Output Pada Sektor Kesehatan Tahun 1999

Kab/Kota	Output	Aktual	Target	Achieved
Kab. Tegal	Angka Harapan Hidup	65,2	5300,5	1,2%
Kab. Cilacap	Angka Harapan Hidup	67,2	4199,3	1,6%
Kota Semarang	Angka Harapan Hidup	70,2	2355,7	3,0%
Kab. Pemalang	Angka Harapan Hidup	64,5	2037,6	3,2%
Kab. Brebes	Angka Harapan Hidup	63,3	1520,7	4,2%
Kab. Banyumas	Angka Harapan Hidup	68,1	1551,7	4,4%
Kab. Wonogiri	Angka Harapan Hidup	71,1	1514,0	4,7%
Kab. Blora	Angka Harapan Hidup	69,9	1451,4	4,8%
Kab. Kendal	Angka Harapan Hidup	64,7	1182,0	5,5%
Kab. Jepara	Angka Harapan Hidup	69,6	1241,5	5,6%
Kab. Grobogan	Angka Harapan Hidup	67,8	1198,2	5,7%
Kab. Semarang	Angka Harapan Hidup	70,6	1163,4	6,1%
Kab. Demak	Angka Harapan Hidup	68,7	1077,3	6,4%
Kab. Purbalingga	Angka Harapan Hidup	67,4	946,8	7,1%
Kab. Pati	Angka Harapan Hidup	71,6	891,7	8,0%
Kab. Rembang	Angka Harapan Hidup	68,0	770,0	8,8%
Kab. Magelang	Angka Harapan Hidup	68,0	733,3	9,3%
Kab. Karanganyar	Angka Harapan Hidup	70,1	729,5	9,6%
Kab. Klaten	Angka Harapan Hidup	69,1	686,1	10,1%
Kab. Purworejo	Angka Harapan Hidup	67,7	662,0	10,2%
Kab. Boyolali	Angka Harapan Hidup	69,4	617,1	11,2%
Kab. Kudus	Angka Harapan Hidup	67,8	573,7	11,8%
Kota Surakarta	Angka Harapan Hidup	70,9	579,2	12,2%
Kab. Batang	Angka Harapan Hidup	68,1	545,9	12,5%
Kab. Kebumen	Angka Harapan Hidup	67,2	532,4	12,6%
Kab. Banjarnegara	Angka Harapan Hidup	67,4	516,9	13,0%
Kota Tegal	Angka Harapan Hidup	66,6	467,5	14,2%

Kab/Kota	Output	Aktual	Target	Achieved
Kab. Pekalongan	Angka Harapan Hidup	66,5	451,0	14,7%
Kab. Wonosobo	Angka Harapan Hidup	67,7	388,8	17,4%
Kab. Temanggung	Angka Harapan Hidup	70,7	296,2	23,9%
Kab. Sukoharjo	Angka Harapan Hidup	69,1	266,9	25,9%
Kab. Sragen	Angka Harapan Hidup	70,8	221,8	31,9%
Kota Magelang	Angka Harapan Hidup	69,1	210,6	32,8%
Kota Pekalongan	Angka Harapan Hidup	68,1	199,2	34,2%
Kota Salatiga	Angka Harapan Hidup	69,5	69,5	100,0%

Sumber : BPS, diolah

Tabel 5 menunjukkan solusi bagaimana meningkatkan efisiensi pada kabupaten/kota yang belum efisien dengan cara memaksimalkan output. Bila kabupaten/kota itu efisien, pada kolom *achieved* menunjukkan angka 100% dan pada kolom aktual dan target nilainya sama. Dan apabila kabupaten/kota tersebut tidak efisien maka nilai pada kolom aktual dan target berbeda, biasanya kolom target nilainya lebih besar dari pada kolom aktual. Ini menandakan bahwa berapa besar nilai output yang harus ditingkatkan agar kabupaten/kota tersebut menjadi efisien.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, tingkat efisiensi pengeluaran kesehatan pada tahun 1999 mayoritas tidak efisien hanya Kota Salatiga saja yang tingkat efisiensinya sempurna. Kabupaten Tegal efisiensi pengeluaran kesehatannya tidak efisien, untuk meningkatkan efisiensinya menjadi 100% maka harus meningkatkan outputnya yaitu angka harapan hidup sebesar 5300,5%. Begitu juga Kabupaten

Cilacap, efisiensi yang dicapainya hanya sebesar 1,6%. Agar efisiensi pengeluaran kesehatannya menjadi 100% maka Kabupaten Cilacap harus meningkatkan outputnya yaitu angka harapan hidup sebesar 4199,3%.

Dari tabel 6 dapat dilihat, tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan pada tahun 2002 meningkat dari tahun sebelumnya (1999). Kota Surakarta merupakan daerah yang mampu mengalokasikan pengeluaran kesehatannya secara optimal. Sama halnya dengan tahun 1999 daerah yang efisiensi pengeluaran kesehatannya belum efisien maka harus meningkatkan outputnya yaitu angka harapan hidup di masing-masing daerah. Seperti di Kabupaten Karanganyar efisiensi pengeluaran kesehatannya sebesar 68,8%. Artinya Kabupaten Karanganyar harus meningkatkan outputnya yaitu angka harapan hidup sebesar 104,3% agar tingkat efisiensi pengeluaran kesehatannya menjadi sempurna yaitu sebesar 100%.

Tabel 6: Aktual, Target dan Efisiensi Yang Dicapai Dengan Memaksimumkan Output Pada Sektor Kesehatan Tahun 2002

Kab/Kota	Output	Aktual	Target	Achieved
Kab. Jepara	Angka Harapan Hidup	70,0	2278,9	3,1%
Kab. Pati	Angka Harapan Hidup	72,5	1402,8	5,2%
Kab. Tegal	Angka Harapan Hidup	66,2	1224,8	5,4%
Kota Tegal	Angka Harapan Hidup	66,9	1229,9	5,4%
Kota Salatiga	Angka Harapan Hidup	70,2	972,5	7,2%
Kab. Purbalingga	Angka Harapan Hidup	67,6	914,1	7,4%
Kab. Wonosobo	Angka Harapan Hidup	68,5	919,8	7,4%
Kab. Semarang	Angka Harapan Hidup	71,3	874,1	8,2%
Kab. Grobogan	Angka Harapan Hidup	68,1	760,7	9,0%
Kota Semarang	Angka Harapan Hidup	70,4	726,3	9,7%
Kab. Rembang	Angka Harapan Hidup	68,6	700,4	9,8%
Kab. Cilacap	Angka Harapan Hidup	67,8	663,4	10,2%
Kab. Temanggung	Angka Harapan Hidup	71,4	675,9	10,6%
Kab. Blora	Angka Harapan Hidup	70,3	606,0	11,6%
Kab. Brebes	Angka Harapan Hidup	64,3	388,7	16,5%
Kab. Kendal	Angka Harapan Hidup	65,0	347,9	18,7%
Kab. Batang	Angka Harapan Hidup	68,7	352,2	19,5%
Kab. Kudus	Angka Harapan Hidup	68,2	337,3	20,2%
Kab. Sukoharjo	Angka Harapan Hidup	69,3	342,4	20,2%
Kab. Banjarnegara	Angka Harapan Hidup	67,7	320,6	21,1%
Kab. Kebumen	Angka Harapan Hidup	67,6	288,0	23,5%
Kab. Klaten	Angka Harapan Hidup	69,8	289,4	24,1%
Kab. Pemalang	Angka Harapan Hidup	65,2	265,0	24,6%
Kota Magelang	Angka Harapan Hidup	69,3	279,0	24,8%
Kab. Boyolali	Angka Harapan Hidup	69,6	241,5	28,8%
Kab. Wonogiri	Angka Harapan Hidup	71,6	247,9	28,9%
Kota Pekalongan	Angka Harapan Hidup	68,6	206,6	33,2%
Kab. Sragen	Angka Harapan Hidup	71,5	198,8	36,0%
Kab. Magelang	Angka Harapan Hidup	68,8	187,6	36,7%
Kab. Purworejo	Angka Harapan Hidup	68,0	166,6	40,8%
Kab. Banyumas	Angka Harapan Hidup	68,6	163,2	42,0%
Kab. Pekalongan	Angka Harapan Hidup	66,6	143,0	46,6%
Kab. Karanganyar	Angka Harapan Hidup	71,8	104,3	68,8%
Kota Surakarta	Angka Harapan Hidup	71,1	71,1	100,0%

Sumber : BPS, diolah

PENUTUP Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program *Data Envelopment Analysis* (DEA) terhadap tingkat efisiensi pengeluaran pendidikan dan kesehatan pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 1999 dan 2002 adalah sebagai berikut :

1. Tingkat efisiensi pengeluaran pendidikan pada tahun 1999 di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah cenderung belum efisien. Tingkat efisiensi sempurna (100%) hanya pada Kota Salatiga, lalu Kabupaten Temanggung yang mencapai tingkat efisiensi cukup baik sebesar 62,1%. Sedangkan untuk

- kabupaten/kota lainnya rata-rata tingkat efisiensinya dibawah 50%.
2. Tahun 2002 tingkat efisiensi pengeluaran pendidikan meningkat dari tahun sebelumnya (1999), namun masih dikategorikan belum efisien. Hanya Kabupaten Boyolali yang tingkat efisiensinya terbaik (100%), kemudian Kota Salatiga 99,9%, Kota Magelang (88,8%), Kota Surakarta (54,3%) dan Kabupaten Sragen (53,8%). Sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya tingkat efisiensinya di bawah 50%.
 3. Tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah daerah di sektor kesehatan tahun 1999 di kabupaten/kota Jawa Tengah mayoritas belum efisien. Hanya Kota Salatiga saja yang tingkat efisiensinya terbaik (100%). Sedangkan tingkat efisiensi di 34 kabupaten/kota Jawa Tengah rata-rata dibawah 50%.
 4. Tahun 2002 tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan sedikit membaik, terjadi peningkatan walaupun peningkatan tersebut tidak banyak. Kota Surakarta merupakan Kota yang tingkat efisiensi pengeluaran kesehatannya sempurna (100%), lalu kabupaten Karanganyar 68,84% dan untuk kabupaten/kota lainnya rata-rata tingkat efisiensinya di bawah 50%.
 5. Terjadi perbedaan tingkat efisiensi pada pengeluaran pemerintah daerah baik di sektor pendidikan dan kesehatan pada tahun 1999 dan 2002. Tingkat efisiensi tahun 2002 cenderung meningkat dari tahun 1999. Ini berarti pemerintah daerah di masing-masing daerahnya

telah melakukan perbaikan kinerja pemerintahannya namun perbaikan tersebut belum optimal.

Implikasi

1. Perlunya monitoring dan evaluasi yang terus-menerus terhadap pengeluaran pemerintah daerah khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga pemborosan pengeluaran pemerintah daerah dapat dieliminir. Karena pengurangan pengalokasian pengeluaran pemerintah daerah yang tepat dapat meningkatkan tingkat efisiensi pada pengeluaran tersebut.
2. Dalam rangka peningkatan efisiensi, dukungan pemerintah di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah dan pihak-pihak yang terkait sangat diperlukan. Terutama dalam penyaluran dana untuk pengeluaran pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Pentingnya perencanaan yang matang dalam mengatur pengeluaran pemerintah di kabupaten/kota sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dana yang akan sangat merugikan masyarakat di masing-masing daerah.
4. Untuk daerah yang belum efisien pengeluaran pemerintahannya baik di sektor pendidikan maupun kesehatan, hendaknya memperbaiki kinerja pemerintahannya. Hal ini dilakukan agar pengalokasian pengeluaran pemerintah di dua sektor tersebut dapat terealisasi dengan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Afonso, Antonio, L. Schuknecht and V. Tanzi (2005). "Public Sector Efficiency: An International Comparison", *Public Choice*, 123(3-4), 321- 47
- _____ (2006). "Public Sector Efficiency: Evidence for New EU Member States and Emerging Market, *European Central Bank Working Paper Series*, No. 581.
- BPS (berbagai tahun terbitan), *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*.

- _____ (berbagai tahun terbitan), *Data dan Informasi Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota*.
- _____ (2003), *Jawa Tengah Dalam Angka*.
- _____ (2002), *Pendapatan Regional Jawa Tengah*.
- Conceicao, D. Maria and Sampaio Da Seusa (2005). "Techinal Efficiency of the Brazilian Municipalities: Correcting Nonparametric Frontier Measurement for Outlier", *Journal of Productivity Analysis*, 24, 157-81.
- De Borger, B. Kerstens, K, Moesen, W and Vanneste, J (1994). "Explaining differences in Productive Efficiency: An Application to Belgian Municipalities", *Public Choice*, 80, 339-58.
- De Borger, B and Kerstens, K (1996). "Cost Efficiency of Belgian Local Government: A Comparative Analysis of FDH, DEA and Econometric Approach", *Regional Science and Urban Economics*, 26, 145-70.
- Gupta, Sanjeev, K. Honjo, and M. Verhoeven (1997). "The efficiency of Government Expenditure: Experiences from Africa", *IMF Working Paper*, WP/97/153.
- Hollingsworth, Bruce (2003). "Non-Parametric and Parametric Application Measuring Efficiency in Health Care", *Health Care Management Science*, 6, 203-18.
- Joumard, I., Kongsrud, P., Nam, Y-S and Price, R (2004). "Enhancing the Effectiveness of Public Spending: Experience in OECD Countries", *European Central Bank Working Paper Series*, No. 380.
- Kartasmita, Ginanjar (1996), *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CID
- Kurnia, Akhmad Syakir, "Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik Metode Free Disposable Hull (FDH)", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 11, No.1 : 1-20.
- Sebayang, Asnita Frida (2005), "Kinerja Kebijakan Fiskal Daerah Di Indonesia Pasca Krisis", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10, No.3, 203-213.
- Tarigan, Antonius (2005), "Urgensi Penguatan Kueuangan Daerah Suatu Tinjauan Terhadap Regulasi Daerah dan Implikasinya Dalam Penyediaan Pelayanan Publik, *Perencanaan Pembangunan*, Edisi 04, Tahun IX, 46-53.
- Wahyudi, Noeroso, L., (2004). "Dampak Sosial Ekonomi dan Evaluasi Belanja Daerah dan proyek Pembangunan Studi Kasus Sektor Pendidikan", *Bunga Rampai Hasil Penelitian*, 45-64.
- Zhu, Joe (1998). "Data Envelopment Analysis vs Principal Component Analysis: An Illustrative Study of Economic Performance of Chinese Cities", *European Journal of Operational Research*, 111, 50-61.